



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan asuransi sosial;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Prajurit Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya.
2. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan.
6. Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah PNS di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.

11. Pensiun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
13. Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
14. Gugur adalah:
 - a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan; atau
 - b. Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam tugas kepolisian, sebagai akibat dari tindakan langsung lawan atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.
15. Tewas adalah:
 - a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan; atau
 - b. Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepolisian atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas.
16. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.

17. Cacat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
18. Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
19. Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI, Polri, atau PNS Kemhan dan PNS Polri.
20. Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI, Polri, atau PNS Kemhan dan PNS Polri.
21. Faktor Indeks Iuran yang selanjutnya disingkat FII adalah indeks manfaat terhadap Penghasilan terakhir pada saat peserta pensiun, berhenti, Gugur, Tewas, atau Meninggal Dunia Biasa yang dihitung berdasarkan kombinasi formulasi manfaat pasti dan formulasi iuran pasti.
22. Pejabat yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

23. Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

23. Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri.
24. Pemberi Kerja adalah Pemerintah yang mempekerjakan peserta.
25. Pengelola Program adalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk mengelola Asuransi Sosial bagi peserta.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
28. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Asuransi Sosial dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi program:

- a. THT;
- b. JKK;
- c. JKm; dan
- d. Pensiun.

BAB II

TABUNGAN HARI TUA

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta program THT terdiri atas:

a. Prajurit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. PNS Kemhan;
 - d. Calon PNS Kemhan;
 - e. PNS Polri;
 - f. Calon PNS Polri;
 - g. PPPK Kemhan; dan
 - h. PPPK Polri.
- (2) Kepesertaan program THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan.

Pasal 4

Kepesertaan program THT berakhir apabila:

- a. diberhentikan dari dinas keprajuritan;
- b. diberhentikan dari Anggota Polri;
- c. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kemhan;
- d. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri; atau
- e. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Bagian Kedua Manfaat Program THT

Pasal 5

Manfaat program THT meliputi:

- a. tabungan asuransi;
- b. nilai tunai tabungan asuransi;
- c. biaya pemakaman peserta pensiunan;
- d. biaya pemakaman istri atau suami; dan
- e. biaya pemakaman anak.

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 1

Tabungan Asuransi

Pasal 6

- (1) Tabungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.
- (2) Besar tabungan asuransi dihitung dengan formula FII dikalikan Penghasilan terakhir sebelum pensiun.

Paragraf 2

Nilai Tunai Tabungan Asuransi

Pasal 7

- (1) Nilai tunai tabungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari peserta yang Gugur, Tewas, dan Meninggal Dunia Biasa dalam status dinas aktif.
- (2) Besar nilai tunai tabungan asuransi dihitung dengan formula FII dikalikan Penghasilan terakhir pada saat berhenti atau Gugur, Tewas, dan Meninggal Dunia Biasa.

Paragraf 3

Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan

Pasal 8

- (1) Biaya pemakaman peserta pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada ahli waris peserta.
- (2) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Biaya pemakaman peserta pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paragraf 4

Biaya Pemakaman Istri atau Suami

Pasal 9

- (1) Biaya pemakaman istri atau suami yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada peserta atau ahli waris.
- (2) Biaya pemakaman istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Paragraf 5

Biaya Pemakaman Anak

Pasal 10

- (1) Biaya pemakaman anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada peserta atau ahli waris.
- (2) Biaya pemakaman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) anak yang masuk dalam tunjangan.
- (3) Biaya pemakaman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Ketiga
Iuran Program THT

Pasal 11

- (1) Iuran program THT terdiri atas:
 - a. Iuran peserta; dan
 - b. Iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari Penghasilan setiap bulan.
- (3) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (4) Kewajiban membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada saat peserta menerima Penghasilan pertama dan berakhir pada saat peserta menerima Penghasilan terakhir.

BAB III

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 12

- (1) Peserta program JKK terdiri atas:
 - a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. PNS Kemhan;
 - d. Calon PNS Kemhan;
 - e. PNS Polri;
 - f. Calon PNS Polri;
 - g. PPPK Kemhan; dan
 - h. PPPK Polri.

(2) Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Peserta program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak termasuk prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepesertaan program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan.

Pasal 13

Kepesertaan program JKK berakhir apabila:

- a. diberhentikan dari dinas keprajuritan;
- b. diberhentikan dari Anggota Polri;
- c. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kemhan;
- d. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri; atau
- e. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Bagian Kedua Manfaat Program JKK

Pasal 14

Manfaat program JKK meliputi:

- a. perawatan; dan/atau
- b. santunan.

Pasal 15

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;

c. rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter dan/atau medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja di luar tugas latihan dan operasi, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai dengan peserta sembuh.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
- (5) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 16

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. santunan cacat dinas khusus;
- b. santunan cacat dinas biasa;

c. santunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. santunan risiko kematian khusus karena gugur;
- d. santunan risiko kematian khusus karena tewas;
- e. biaya pengangkutan peserta kecelakaan kerja; dan/atau
- f. bantuan beasiswa.

Pasal 17

- (1) Santunan cacat dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan santunan cacat dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. santunan Cacat Tingkat III;
 - b. santunan Cacat Tingkat II; dan
 - c. santunan Cacat Tingkat I.
- (2) Santunan cacat dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. golongan C; dan
 - b. golongan B.
- (3) Santunan cacat dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cacat golongan A.
- (4) Besar santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Santunan risiko kematian khusus karena Gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada ahli waris peserta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Santunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Santunan risiko kematian khusus karena Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diberikan kepada ahli waris peserta sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Biaya pengangkutan peserta kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f diberikan untuk anak peserta yang Gugur, Tewas, atau Cacat Tingkat III.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) orang anak dengan ketentuan:
 - a. masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus.

Pasal 21

- (1) Santunan cacat dinas khusus dan santunan cacat dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b ditentukan atas dasar tingkat dan golongan kecacatan.

(2) Penentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Penentuan tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Panglima, atau Kapolri berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Prajurit, Anggota Polri, PNS, dan PPPK oleh panitia evaluasi kecacatan.
- (3) Panitia evaluasi kecacatan dibentuk ditingkat pusat atau daerah dan ditetapkan oleh Menteri, Panglima, atau Kapolri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Panglima, atau Peraturan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Santunan risiko kematian khusus Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d ditentukan atas dasar penetapan status Gugur atau Tewas.
- (2) Status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Menteri, Panglima, atau Kapolri berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Panglima, atau Peraturan Kapolri.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Ketiga
Iuran Program JKK

Pasal 23

- (1) Iuran program JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari gaji peserta setiap bulan.

BAB IV
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 24

- (1) Peserta program JKm terdiri atas:
 - a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. PNS Kemhan;
 - d. Calon PNS Kemhan;
 - e. PNS Polri;
 - f. Calon PNS Polri;
 - g. PPPK Kemhan; dan
 - h. PPPK Polri.
- (2) Peserta program JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak termasuk prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Kepesertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Kepesertaan program JKm berakhir apabila:
- a. diberhentikan dari dinas keprajuritan;
 - b. diberhentikan dari Anggota Polri;
 - c. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kemhan;
 - d. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri; atau
 - e. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Bagian Kedua
Manfaat Program JKm

Pasal 25

Manfaat program JKm meliputi:

- a. santunan risiko kematian, terdiri atas:
 1. santunan kematian sekaligus;
 2. uang duka wafat; dan
 3. biaya pemakaman.
- b. bantuan beasiswa.

Pasal 26

Manfaat santunan risiko kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada ahli waris dari peserta yang Meninggal Dunia Biasa dalam status dinas aktif.

Pasal 27

- (1) Santunan kematian sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1 sebagai berikut:
 - a. perwira . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. perwira Tentara Nasional Indonesia, perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan
 - b. bintangara dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, bintangara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pelaksana sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Santunan kematian sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1 bagi PPPK diberikan dengan besaran sesuai dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 2 diberikan kepada ahli waris dari Prajurit, Anggota Polri, dan PNS sebesar tiga kali gaji.

Pasal 29

Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 3 diberikan kepada ahli waris dari Prajurit, Anggota Polri, dan PNS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) orang anak peserta dengan ketentuan:
 - a. masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus.

Bagian Ketiga Iuran Program JKm

Pasal 31

- (1) Iuran program JKm ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran program JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) dari gaji peserta per bulan.

BAB V PROGRAM PENSIUN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 32

- (1) Peserta program Pensiun terdiri atas:
 - a. Prajurit;
 - b. Anggota Polri;
 - c. PNS Kemhan;

d. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- d. Calon PNS Kemhan;
 - e. PNS Polri; dan
 - f. Calon PNS Polri.
- (2) Kepesertaan program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatan dan gaji dibayarkan.

Pasal 33

Kepesertaan program Pensiun berakhir apabila:

- a. diberhentikan dari dinas keprajuritan;
- b. diberhentikan dari Anggota Polri;
- c. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kemhan; atau
- d. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri.

Bagian Kedua Manfaat Program Pensiun

Pasal 34

Manfaat program Pensiun meliputi:

- a. jaminan Pensiun; dan
- b. nilai tunai Iuran Pensiun.

Paragraf 1 Jaminan Pensiun

Pasal 35

Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan kepada peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 2
Nilai Tunai Iuran Pensiun

Pasal 36

- (1) Nilai tunai Iuran Pensiun diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa:
 - a. hak Pensiun;
 - b. tunjangan bersifat Pensiun;
 - c. tunjangan; atau
 - d. pesangon.
- (2) Dalam hal peserta aktif berstatus bujangan, atau berstatus duda atau janda tanpa anak atau anaknya sudah tidak masuk tunjangan, meninggal dunia bukan karena Gugur atau Tewas, nilai tunai Iuran Pensiun diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Dalam hal peserta aktif berstatus janda atau duda meninggal dunia tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai tunai Iuran Pensiun diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada peserta yang diberhentikan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1975 dan paling sedikit telah membayar Iuran 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Formula pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun bagi peserta yang diangkat dan diberhentikan sebelum tanggal 1 Januari 2001 sebagai berikut:

$$F1 \times P1$$

(2) Formula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Formula pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun bagi peserta yang diangkat dan diberhentikan setelah tanggal 1 Januari 2001 sebagai berikut:

$$F2 \times P2$$

- (3) Formula pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun bagi peserta yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan setelah tanggal 1 Januari 2001 sebagai berikut:

$$(F1 \times P1) + \{ F2 \times (P2 - P1) \}$$

- (4) Besarnya faktor dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan tabel faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38

Pendanaan pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun bersumber dari akumulasi pengelolaan Iuran Pensiun.

Bagian Ketiga Iuran

Pasal 39

- (1) Iuran terdiri atas:
- Iuran peserta; dan
 - Iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 4,75 % (empat koma tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan setiap bulan.
- (3) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(4) Kewajiban . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Kewajiban membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada saat peserta menerima Penghasilan pertama dan berakhir pada saat peserta menerima Penghasilan terakhir.

Pasal 40

- (1) Akumulasi Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh pemerintah.
- (2) Akumulasi Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pemerintah untuk:
 - a. membiayai pembayaran manfaat Pensiun;
 - b. talangan pembayaran manfaat pensiun awal tahun;
 - c. talangan pembayaran kekurangan manfaat pensiun akhir tahun;
 - d. biaya penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun;
 - e. pengembangan dalam instrumen investasi; dan
 - f. PUM KPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan akumulasi Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 41

- (1) PUM KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f hanya diberikan kepada peserta aktif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian PUM KPR bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pemberian PUM KPR diatur oleh Pengelola Program.

BAB VI PENYEDIAAN ANGGARAN, PEMBAYARAN IURAN, PENGAJUAN KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM, DAN PELAPORAN PROGRAM

Bagian Kesatu Penyediaan Anggaran dan Pembayaran Iuran

Pasal 42

- (1) Pemberi Kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran program THT, JKK, JKm, dan pembayaran Iuran Pensiun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun.
- (2) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemberi Kerja melakukan pembayaran Iuran program JKK dan JKm kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Iuran program JKK dan JKm yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Bagian Kedua
Pengajuan Klaim dan Pembayaran Klaim

Pasal 45

- (1) Peserta atau ahli waris mengajukan klaim manfaat program THT, JKK, JKm, dan nilai tunai Iuran Pensiun kepada Pengelola Program.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. istri atau suami apabila peserta meninggal dunia meninggalkan istri atau suami;
 - b. anak apabila peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami;
 - c. orang tua apabila peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak; atau
 - d. ahli waris lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila peserta yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri, suami, anak ataupun orang tua.
- (3) Dalam hal peserta yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri, suami, anak ataupun orang tua, manfaat program THT untuk biaya pemakaman peserta pensiunan dapat diberikan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman peserta.
- (4) Pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK berupa perawatan oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan.
- (5) Pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK berupa santunan Cacat oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

Pasal 46

- (1) Pengelola Program membayar manfaat program THT, JKK, JKm, dan nilai tunai Iuran Pensiun paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Pembayaran manfaat program THT, JKK, JKm, dan nilai tunai Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus (*lumpsum*).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat, pembayaran manfaat, dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pengelola Program.

Pasal 48

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program THT, JKK, JKm, dan Pensiun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri, dan Kapolri secara berkala, dengan tembusan kepada Panglima dan Kepala Staf Angkatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan jenis laporan penyelenggaraan program THT, JKK, JKm, dan Pensiun diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 49

- (1) Besaran Iuran dan manfaat program JKK dan JKm dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bersama dengan Menteri dan Kapolri.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan penyelenggaraan program JKK dan JKm dari Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 50

- (1) Iuran program THT, JKK, JKm, dan Pensiun dikelola dan dapat dikembangkan oleh Pengelola Program secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan Iuran program THT, JKK, JKm, dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 51

PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) mengelola program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Pengelola Program tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, Pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program THT, JKK, JKm, dan Pensiun.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam hal terjadi krisis keuangan, kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, atau terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi solvabilitas Pengelola Program.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 53

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 54

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawasan internal.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI;
 - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. Auditor independen.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Peserta Asuransi Sosial wajib memberi keterangan data secara tepat dan benar mengenai dirinya beserta seluruh anggota keluarga termasuk orang tuanya melalui instansi tempat yang bersangkutan berdinass.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan keterangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik kepada Pengelola Program.
- (3) Dalam hal peserta Asuransi Sosial pindah dan/atau alih status ke instansi di luar lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kewajiban dan hak Asuransi Sosial yang bersangkutan akan mengikuti di instansi yang baru.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Dalam hal peserta Asuransi Sosial ditugaskan ke instansi di luar lingkungan Kemhan, TNI, Polri maka kewajiban dan hak Asuransi Sosial yang bersangkutan tetap mengikuti Asuransi Sosial di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 56

- (1) Manfaat tabungan asuransi peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau tunjangan bersifat Pensiun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan belum mengajukan klaim diberikan sebesar paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Manfaat nilai tunai tabungan asuransi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tanpa tunjangan bersifat Pensiun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan belum mengajukan klaim diberikan sebesar paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Manfaat biaya pemakaman peserta pensiunan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan ahli waris belum mengajukan klaim diberikan sebesar paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Manfaat santunan risiko kematian sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan ahli waris belum mengajukan klaim diberikan sebesar paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Manfaat pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan belum mengajukan klaim diberikan sebesar paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyandang Cacat yang waktu kejadian cacatnya sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan dan belum dibayarkan santunan, pembayaran santunan dan tunjangan cacatnya tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. Ketentuan yang mengatur mengenai santunan cacat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Pasal 73 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Asuransi Sosial yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 60

Pembayaran Iuran program JKK dan JKm berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dimulai bulan Juli 2015.

Pasal 61

Manfaat JKK dan JKm berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan terhitung mulai bulan Juli 2015.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 324

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Kerjasama, Deputi Bidang Hukum
dan Deputi Bidang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan pada saat masih dalam dinas aktif maupun setelah purna tugas.

Penghargaan Pemerintah terkait dengan kesejahteraan sosial antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian manfaat Asuransi Sosial yang meliputi THT, JKK, JKm, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Asuransi Sosial diselenggarakan dengan mewajibkan setiap Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membayar iuran sebesar prosentase yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cara memotong dari penghasilan atau gaji setiap bulannya. Selain itu Pemerintah juga berkewajiban mengiur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iuran tersebut dikelola oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), hasilnya dikembalikan dalam bentuk pemberian Manfaat Asuransi Sosial, JKK, JKm, Pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun dan PUM KPR.

Manfaat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Manfaat Asuransi Sosial perlu ditingkatkan secara terus-menerus sejalan dengan perubahan kebutuhan hidup agar taraf hidup Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap dapat terpelihara.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial berupa manfaat Asuransi Sosial perlu dibuat Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pengelolaan iuran Asuransi Sosial yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat masih berdinamika aktif maupun setelah purna tugas merupakan substansi materi terpenting yang perlu diatur sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus mengalami perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabungan asuransi” adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun dan tunjangan bersifat Pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai tunai tabungan asuransi” adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun atau tunjangan bersifat Pensiun atau ahli waris dari peserta yang Gugur, Tewas, atau Meninggal Dunia Biasa dalam status dinas aktif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman peserta pensiunan” adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris dalam hal peserta pensiunan Meninggal Dunia Biasa.

Yang dimaksud dengan “peserta pensiunan” adalah peserta yang telah pensiun dari dinas yang dinyatakan dengan adanya Keputusan Pensiun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman istri atau suami” adalah santunan yang diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan, atau ahli waris, dalam hal istri atau suami peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan Iuran THT.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman anak” adalah santunan yang diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan, atau ahli waris, dalam hal anak Peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan Iuran THT.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran Contoh penghitungan sebagai berikut:

- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 dihitung dengan menggunakan FII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- Tahapan perhitungan TA:
 - a. Menghitung menggunakan formulasi manfaat pasti $\{(0,6 \times MI1 \times P1) + (0,6 \times MI2 \times P2)\}$ sampai dengan bulan Desember 2012;
 - b. Menghitung menggunakan formulasi iuran pasti:
 - 1) sejak diangkat sampai dengan Desember 2012;
 - 2) sejak diangkat sampai dengan pensiun.
 - c. Menghitung selisih butir b angka 1) dengan butir b angka 2);
 - d. Menambahkan hasil perhitungan pada butir a dengan hasil perhitungan pada butir c;
 - e. Menetapkan tingkat bunga real berdasarkan hasil perhitungan pada butir d;
 - f. Menghitung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Menghitung indeks dari perbandingan hasil akumulasi iuran berdasarkan perhitungan pada butir e dengan penghasilan terakhir;
- g. Menghitung manfaat TA dengan menggunakan indeks pada butir f yang disebut FII dikalikan P.
- Bagi Peserta yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan akumulasi iuran ditambah pengembangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran Contoh penghitungan sebagai berikut:

- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan diberhentikan sebelum atau pada 1 Januari 2013 dihitung dengan menggunakan formulasi manfaat pasti;
- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 dihitung dengan formulasi transisi manfaat pasti ke iuran pasti (FII dikalikan P); TA
- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan diberhentikan setelah tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan formulasi transisi manfaat pasti ke iuran pasti (FII dikalikan P); NTTA
- Bagi Peserta yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan formulasi iuran pasti (akumulasi iuran ditambah dengan pengembangan).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “istri atau suami yang sah” adalah istri atau suami yang tercantum dalam kartu penunjukan istri, kartu penunjukan suami, kartu suami, atau kartu istri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” meliputi *orthese*, *porthese*, kacamata, dan gigi tiruan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan” adalah mengikuti pendidikan atau masih terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan formal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “belum bekerja” adalah anak peserta belum bekerja secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok terakhir.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “jaminan pensiun” adalah Pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bujangan” adalah peserta:

- a. yang belum pernah menikah; atau
- b. yang berstatus janda atau duda tanpa anak yang masuk tunjangan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “F1” adalah faktor yang dikaitkan dengan masa Iuran sejak diangkat menjadi Prajurit, anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas kepolisian atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dihitung dalam satuan tahun.

Yang dimaksud dengan “P1” adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas kepolisian:

- a. Peserta yang diangkat dan diberhentikan sebelum 1 Januari 2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji saat peserta berhenti; dan/atau

b. Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2001 dan berhenti setelah 1 Januari 2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1993, atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “F2” adalah faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas Kepolisian atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dihitung dalam satuan tahun.

Yang dimaksud dengan “P2” adalah Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau Dinas Kepolisian, atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Kapolri” adalah persyaratan, tata cara, dan mekanisme untuk mendapatkan PUM KPR bagi seorang Prajurit oleh Menteri dan bagi Anggota Polri oleh Kapolri.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterangan data” meliputi data awal peserta dan perubahan data kepangkatan, perubahan data kenaikan gaji berkala, dan/atau perubahan data keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

A. Santunan cacat

1. Tingkat III:

- a. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji;
- b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
- c. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji.

2. Tingkat II:

- a. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji;
- b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
- c. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji.

3. Tingkat I:

- a. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji;
- b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
- c. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji.

B. Perawatan

1. Biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi:

- a. pembelian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
2. Biaya penggantian gigi tiruan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kasus.

Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A.

II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

A. Tabel cacat

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	GOL		
		A	B	C
CACAT TINGKAT III				
1	Kehilangan kedua anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	30,8	49,3	61,6
2	Kelumpuhan kedua anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	30,8	49,3	61,6
3	Kehilangan kedua anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
4	Kelumpuhan kedua anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
5	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
6	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah.	30,8	49,3	61,6
7	Kehilangan penglihatan kedua mata	30,8	49,3	61,6



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	GOL		
		A	B	C
CACAT TINGKAT III				
8	Bisu dan tuli	30,8	49,3	61,6
9	penyakit jiwa berat (hilangnya kemampuan kerja mental tetap)	30,8	49,3	61,6
10	Cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.	30,8	49,3	61,6
CACAT TINGKAT II				
1	penyakit jiwa sedang (hilangnya kemampuan kerja fisik 51%-70%)	17,6	28,2	35,2
2	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	15,4	24,6	30,8
3	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	15,4	24,6	30,8
4	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	17,6	28,2	35,2
5	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	17,6	28,2	35,2
6	Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital	14,2	22,7	28,3
7	Kehilangan penglihatan 1 (satu) mata atau diplopia pada penglihatan dekat	15,4	24,6	30,8
8	Kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan	14,2	22,7	28,3
9	Kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan	14,2	22,7	28,3
10	bisu atau	14,2	22,7	28,3
11	tuli	17,6	28,2	35,2
CACAT TINGKAT I				
1	gangguan kejiwaan yang ringan	11,0	17,0	20
2	kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki	11,0	17,0	20
3	berkurangnya fungsi mata	11,0	17,0	20
4	kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar, atau	11,0	17,0	20
5	perubahan klasifikasi/ fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cedera/ sakit	11,0	17,0	20

B. Tabel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B. Tabel cacat tetap lainnya

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	GOL		
		A	B	C
CACAT TINGKAT III				
1	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	17,60	35,20	44,00
CACAT TINGKAT II				
1	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	13,03	26,07	32,58
2	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	12,47	24,93	31,17
3	Sebelah kaki dari mata kaki kebawah	8,80	17,60	22,00
4	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	10,56	21,12	26,40
5	Kaki memendek 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	7,04	14,08	17,60
6	Kaki memendek 7,5 cm atau lebih	10,56	21,12	26,40
7	Cacat hilangnya cuping hidung	10,56	21,12	26,40
8	Impotensi	10,56	21,12	26,40
CACAT TINGKAT I				
1	Ibu jari tangan kiri	4,22	8,45	10,56
2	Ruas pertama telunjuk tangan kanan	3,77	7,55	9,43
3	Ruas pertama telunjuk tangan kiri	1,23	2,46	3,08
4	Ruas pertama jari lain tangan kanan	1,89	3,77	4,72
5	Ruas pertama jari lain tangan kiri	0,53	1,06	1,32
6	Kaki memendek sebelah Kurang dari 5cm	3,52	7,04	8,80
7	Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	2,11	4,22	5,28
8	Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	1,06	2,11	2,64
9	Perforasi sekat rongga hidung	5,28	10,56	13,20
10	Kehilangan daya penciuman	3,52	7,04	8,80
11	Hilangnya kemampuan kerja pisik 10%-25% (Gangguan kejiwaan Ringan)	1,76	3,52	4,40
12	Kehilangan penglihatan warna	3,52	7,04	8,80
13	Kehilangan kedua belah daun telinga	3,52	7,04	8,80
CACAT LAINNYA				
1	Terkelupasnya kulit kepala	3,52 s.d 10,56	7,04 s.d 21,12	8,80 s.d 26,40

Catatan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Catatan:

Dalam hal terjadi lebih dari satu macam cacat, maka besarnya maksimal santunan cacat sebagai berikut:

- a. 61,6 x Gaji Untuk Golongan C
- b. 49,3 x Gaji Untuk Golongan B
- c. 30,8 x Gaji Untuk Golongan A

III. FAKTOR NILAI TUNAI IURAN PENSIUN

TABEL FAKTOR NILAI TUNAI IURAN PENSIUN
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MI	Periode Berhenti							
	01-02- 1975 s.d. 30-04- 1985	01-05- 1985 s.d. 30-06- 1991	01-07- 1991 s.d. 31-12- 1991	01-01- 1992 s.d. 31-12- 1992	01-01- 1993 s.d. 31-12- 1993	01-01- 1994 s.d. 31-12- 1994	01-01- 1995 s.d. 31-12- 2000	01-01- 2001 s.d. Seterusnya
1	0.614	0.614	0.848	0.848	0.848	0.848	0.848	0.875
2	1.251	1.251	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.780
3	1.856	1.856	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.669
4	2.371	2.371	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364	3.505
5	2.889	2.889	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.407
6	3.288	3.288	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	5.152
7	3.712	3.712	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535	5.956
8	4.124	4.124	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	6.821
9		4.446	6.212	6.248	6.371	6.453	6.476	7.756
10		4.787	6.695	6.891	7.102	7.239	7.334	8.398
11		4.873	7.179	7.262	7.765	7.995	8.147	8.905
12			7.550	8.038	8.451	8.679	8.926	9.437
13			7.827	8.411	8.937	9.385	9.632	9.994
14			8.055	8.689	9.310	9.873	10.361	10.579
15			8.363	8.967	9.588	10.248	10.850	11.191
16			8.499	9.227	9.867	10.526	11.226	11.831
17			8.623	9.360	10.127	10.805	11.505	12.503
18				9.481	10.257	11.067	11.786	12.829
19					10.377	11.195	12.047	13.170
20						11.311	12.173	13.528
21							12.286	13.902
22								14.295



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

MI	Periode Berhenti							
	01-02- 1975 s.d. 30-04- 1985	01-05- 1985 s.d. 30-06- 1991	01-07- 1991 s.d. 31-12- 1991	01-01- 1992 s.d. 31-12- 1992	01-01- 1993 s.d. 31-12- 1993	01-01- 1994 s.d. 31-12- 1994	01-01- 1995 s.d. 31-12- 2000	01-01- 2001 s.d. Seterusnya
23								14.707
24								15.137
25								15.590
26								15.628
27								15.671
28								15.713
29								15.758
30								15.805

IV. CONTOH PERHITUNGAN

Contoh Perhitungan Manfaat Tabungan Asuransi (TA).

Data peserta.

Pangkat Pengangkatan Pertama : Prada
Pangkat Terakhir : Peltu
Tanggal Lahir : 4 Agustus 1962
TMT Pengangkatan : 1 Agustus 1982
TMT Pensiun : 1 September 2015
Gaji Pokok Terakhir : Rp 3.608.600,00
Status Keluarga terakhir : 1 istri dan 1 anak
Tanggal menikah : 22 Desember 1992
Tanggal lahir anak ke-1 : 13 Mei 1994
Tanggal lahir anak ke-2 : 15 September 1998

1. Menghitung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. Menghitung akumulasi premi berdasarkan riwayat kepangkatan dan status keluarga dengan tingkat bunga pengembangan 8,25% per tahun

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01/08/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	936	6,44	942,44
2	01/09/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	1.872	12,91	1.891,35
3	01/10/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	2.808	19,44	2.846,79
4	01/11/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	3.744	26,01	3.808,80
5	01/12/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	4.680	32,62	4.777,42
6	01/01/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	5.616	39,28	5.752,70
7	01/02/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	6.552	45,98	6.734,68
8	01/03/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	7.488	52,74	7.723,42
9	01/04/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	8.424	59,53	8.718,95
10	01/05/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	9.360	66,38	9.721,33
11	01/06/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	10.296	73,27	10.730,60
12	01/07/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	11.232	80,21	11.746,81
13	01/08/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	12.168	87,19	12.770,00
14	01/09/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	13.104	94,23	13.800,23
15	01/10/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	14.040	101,31	14.837,54
16	01/11/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	14.976	108,44	15.881,98
17	01/12/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	15.912	115,62	16.933,60
18	01/01/1984	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	16.848	122,85	17.992,45
19	01/02/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	17.924	131,10	19.199,95
20	01/03/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	19.001	139,40	20.415,75
21	01/04/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	20.077	147,76	21.639,91
22	01/05/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	21.154	156,17	22.872,48
23	01/06/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	22.230	164,65	24.113,53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	01/07/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	23.306	173,18	25.363,11
25	01/08/1984	PRADA	1000	15.600	20.280	35.880	1.166	24.473	182,39	26.711,60
26	01/09/1984	PRADA	1000	15.600	20.280	35.880	1.166	25.639	191,66	28.069,36
27	01/10/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	26.872	201,46	29.504,20
28	01/11/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	28.105	211,32	30.948,90
29	01/12/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	29.339	221,25	32.403,53
30	01/01/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	30.572	231,25	33.868,16
31	01/02/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	31.806	241,32	35.342,86
32	01/03/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	33.039	251,46	36.827,70
33	01/04/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	34.521	263,38	38.573,08
34	01/05/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	36.003	275,38	40.330,46
35	01/06/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	37.485	287,46	42.099,92
36	01/07/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	38.967	299,63	43.881,55
37	01/08/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	40.449	311,87	45.675,42
38	01/09/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	41.931	324,21	47.481,63
39	01/10/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	43.413	336,62	49.300,25
40	01/11/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	44.895	349,13	51.131,38
41	01/12/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	46.377	361,72	52.975,10
42	01/01/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	47.859	374,39	54.831,49
43	01/02/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	49.341	387,16	56.700,65
44	01/03/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	50.823	400,01	58.582,66
45	01/04/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	52.305	412,94	60.477,60
46	01/05/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	53.787	425,97	62.385,57
47	01/06/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	55.269	439,09	64.306,66
48	01/07/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	56.751	452,30	66.240,96



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49	01/08/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	58.360	466,47	68.316,18
50	01/09/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	59.968	480,73	70.405,66
51	01/10/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	61.577	495,10	72.509,51
52	01/11/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	63.186	509,56	74.627,82
53	01/12/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	64.795	524,13	76.760,70
54	01/01/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	66.403	538,79	78.908,24
55	01/02/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	68.012	553,55	81.070,54
56	01/03/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	69.621	568,42	83.247,71
57	01/04/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	71.230	583,39	85.439,85
58	01/05/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	72.838	598,46	87.647,06
59	01/06/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	74.447	613,63	89.869,44
60	01/07/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	76.056	628,91	92.107,10
61	01/08/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	77.665	644,30	94.360,15
62	01/09/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	79.273	659,79	96.628,69
63	01/10/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	80.882	675,38	98.912,82
64	01/11/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	82.491	691,09	101.212,66
65	01/12/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	84.100	706,90	103.528,31
66	01/01/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	85.708	722,82	105.859,88
67	01/02/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	87.317	738,85	108.207,48
68	01/03/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	88.926	754,99	110.571,22
69	01/04/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	90.535	771,24	112.951,21
70	01/05/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	92.143	787,60	115.347,56
71	01/06/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	93.752	804,07	117.760,38
72	01/07/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	95.361	820,66	120.189,79
73	01/08/1988	PRATU	1000	53.300	0	53.300	1.732	97.093	838,21	122.760,25
74	01/09/1988	PRATU	1000	53.300	0	53.300	1.732	98.825	855,89	125.348,39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+TA+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75	01/10/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	100.684	874,55	128.081,94
76	01/11/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	102.543	893,34	130.834,28
77	01/12/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	104.402	912,27	133.605,55
78	01/01/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	106.261	931,32	136.395,87
79	01/02/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	108.120	950,50	139.205,37
80	01/03/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	109.979	969,82	142.034,19
81	01/04/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	111.838	989,27	144.882,46
82	01/05/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	113.697	1.008,85	147.750,31
83	01/06/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	115.556	1.028,56	150.637,87
84	01/07/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	117.415	1.048,42	153.545,29
85	01/08/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	119.274	1.068,40	156.472,69
86	01/09/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	121.133	1.088,53	159.420,22
87	01/10/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	122.992	1.108,79	162.388,01
88	01/11/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	124.851	1.129,20	165.376,21
89	01/12/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	126.710	1.149,74	168.384,95
90	01/01/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	128.569	1.170,43	171.414,38
91	01/02/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	130.428	1.191,25	174.464,63
92	01/03/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	132.287	1.212,22	177.535,85
93	01/04/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	134.146	1.233,34	180.628,19
94	01/05/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	136.005	1.254,60	183.741,79
95	01/06/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	137.864	1.276,01	186.876,80
96	01/07/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	139.723	1.297,56	190.033,36
97	01/08/1990	KOPDA	1000	61.600	0	61.600	2.002	141.725	1.320,24	193.355,60
98	01/09/1990	KOPDA	1000	61.600	0	61.600	2.002	143.727	1.343,08	196.700,68
99	01/10/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	145.882	1.367,13	200.222,56
100	01/11/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	148.037	1.391,34	203.768,65



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
101	01/12/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	150.192	1.415,72	207.339,12
102	01/01/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	152.346	1.440,27	210.934,14
103	01/02/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	154.501	1.464,99	214.553,88
104	01/03/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	156.656	1.489,87	218.198,50
105	01/04/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	158.811	1.514,93	221.868,18
106	01/05/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	160.965	1.540,16	225.563,09
107	01/06/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	163.120	1.565,56	229.283,40
108	01/07/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	165.275	1.591,14	233.029,29
109	01/08/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	167.430	1.616,89	236.800,93
110	01/09/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	169.584	1.642,82	240.598,50
111	01/10/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	171.739	1.668,93	244.422,18
112	01/11/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	173.894	1.695,22	248.272,15
113	01/12/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	176.049	1.721,68	252.148,58
114	01/01/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	178.203	1.748,34	256.051,67
115	01/02/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	180.358	1.775,17	259.981,59
116	01/03/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	182.513	1.802,19	263.938,53
117	01/04/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	185.779	1.837,03	269.041,81
118	01/05/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	189.045	1.872,12	274.180,18
119	01/06/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	192.312	1.907,44	279.353,87
120	01/07/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	195.578	1.943,01	284.563,13
121	01/08/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	199.091	1.980,53	290.056,91
122	01/09/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	202.604	2.018,29	295.588,45
123	01/10/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	206.118	2.056,32	301.158,02
124	01/11/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	209.631	2.094,61	306.765,88
125	01/12/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	213.144	2.133,17	312.412,30
126	01/01/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	218.124	2.182,07	319.574,35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127	01/02/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	223.104	2.231,31	326.785,64
128	01/03/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	228.084	2.280,89	334.046,51
129	01/04/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	233.064	2.330,81	341.357,30
130	01/05/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	238.044	2.381,07	348.718,35
131	01/06/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	243.024	2.431,68	356.130,01
132	01/07/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	248.004	2.482,63	363.592,62
133	01/08/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	252.984	2.533,94	371.106,54
134	01/09/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	257.964	2.585,59	378.672,11
135	01/10/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	263.058	2.638,39	386.404,88
136	01/11/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	268.153	2.691,56	394.190,82
137	01/12/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	273.247	2.745,09	402.030,29
138	01/01/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	278.341	2.798,98	409.923,65
139	01/02/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	283.436	2.853,25	417.871,28
140	01/03/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	288.530	2.907,89	425.873,55
141	01/04/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	293.625	2.962,90	433.930,83
142	01/05/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	298.719	3.018,30	442.043,51
143	01/06/1994	KOPKA	1100	142.500	17.100	159.600	5.187	303.906	3.074,71	450.305,22
144	01/07/1994	SERDA	1100	147.000	17.640	164.640	5.351	309.257	3.132,64	458.788,66
145	01/08/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	314.939	3.193,24	467.663,94
146	01/09/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	320.621	3.254,25	476.600,23
147	01/10/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	326.303	3.315,69	485.597,96
148	01/11/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	331.985	3.377,55	494.657,55
149	01/12/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	337.667	3.439,83	503.779,42
150	01/01/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	343.349	3.502,55	512.964,01
151	01/02/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	349.031	3.565,69	522.211,74
152	01/03/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	354.713	3.629,27	531.523,05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+TA+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
153	01/04/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	360.395	3.693,28	540.898,37
154	01/05/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	366.077	3.757,74	550.338,15
155	01/06/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	371.759	3.822,64	559.842,83
156	01/07/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	377.441	3.887,98	569.412,85
157	01/08/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	383.123	3.953,78	579.048,67
158	01/09/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	388.805	4.020,02	588.750,73
159	01/10/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	394.487	4.086,73	598.519,50
160	01/11/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	400.169	4.153,89	608.355,43
161	01/12/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	405.851	4.221,51	618.258,98
162	01/01/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	411.534	4.289,59	628.230,61
163	01/02/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	417.216	4.358,15	638.270,80
164	01/03/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	422.898	4.427,18	648.380,02
165	01/04/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	428.580	4.496,68	658.558,74
166	01/05/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	434.262	4.566,66	668.807,44
167	01/06/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	439.944	4.637,12	679.126,60
168	01/07/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	445.626	4.708,06	689.516,70
169	01/08/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	451.639	4.781,77	700.311,75
170	01/09/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	457.652	4.855,98	711.181,01
171	01/10/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	463.666	4.930,71	722.125,00
172	01/11/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	469.679	5.005,95	733.144,23
173	01/12/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	475.692	5.081,71	744.239,22
174	01/01/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	484.559	5.177,61	758.283,87
175	01/02/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	493.426	5.274,16	772.425,07
176	01/03/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	502.293	5.371,38	786.663,49
177	01/04/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	511.160	5.469,27	800.999,80
178	01/05/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	520.027	5.567,83	815.434,67



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
179	01/06/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	528.894	5.667,07	829.968,78
180	01/07/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	538.027	5.768,82	844.870,36
181	01/08/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	547.160	5.871,27	859.874,39
182	01/09/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	556.293	5.974,42	874.981,57
183	01/10/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	565.425	6.078,29	890.192,62
184	01/11/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	574.558	6.182,86	905.508,24
185	01/12/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	583.691	6.288,16	920.929,16
186	01/01/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	592.824	6.394,18	936.456,10
187	01/02/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	601.956	6.500,92	952.089,78
188	01/03/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	611.089	6.608,40	967.830,94
189	01/04/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	620.222	6.716,63	983.680,33
190	01/05/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	629.355	6.825,59	999.638,68
191	01/06/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	638.488	6.935,30	1.015.706,74
192	01/07/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	647.620	7.045,77	1.031.885,27
193	01/08/1998	SERTU	1100	263.500	31.620	295.120	9.591	657.212	7.160,15	1.048.636,82
194	01/09/1998	SERTU	1100	263.500	31.620	295.120	9.591	666.803	7.275,32	1.065.503,54
195	01/10/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	676.566	7.392,46	1.082.658,68
196	01/11/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	686.328	7.510,40	1.099.931,76
197	01/12/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	696.091	7.629,15	1.117.323,59
198	01/01/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	705.854	7.748,72	1.134.834,99
199	01/02/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	715.616	7.869,11	1.152.466,78
200	01/03/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	725.379	7.990,33	1.170.219,79
201	01/04/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	735.142	8.112,38	1.188.094,85
202	01/05/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	744.905	8.235,27	1.206.092,80
203	01/06/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	754.667	8.359,01	1.224.214,49
204	01/07/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	764.430	8.483,59	1.242.460,76



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
205	01/08/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	774.193	8.609,04	1.260.832,48
206	01/09/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	783.955	8.735,34	1.279.330,50
207	01/10/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	793.718	8.862,52	1.297.955,70
208	01/11/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	803.481	8.990,56	1.316.708,94
209	01/12/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	813.243	9.119,49	1.335.591,11
210	01/01/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	823.006	9.249,31	1.354.603,10
211	01/02/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	832.769	9.380,01	1.373.745,79
212	01/03/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	842.531	9.511,62	1.393.020,09
213	01/04/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	852.294	9.644,13	1.412.426,90
214	01/05/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	862.057	9.777,55	1.431.967,13
215	01/06/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	871.819	9.911,89	1.451.641,70
216	01/07/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	881.582	10.047,16	1.471.451,54
217	01/08/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	891.834	10.186,71	1.491.889,99
218	01/09/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	902.086	10.327,22	1.512.468,95
219	01/10/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	912.337	10.468,70	1.533.189,39
220	01/11/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	922.589	10.611,16	1.554.052,29
221	01/12/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	932.841	10.754,59	1.575.058,62
222	01/01/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	962.277	11.030,90	1.615.525,75
223	01/02/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	991.713	11.309,11	1.656.271,09
224	01/03/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	1.021.149	11.589,24	1.697.296,56
225	01/04/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.051.371	11.876,69	1.739.394,94
226	01/05/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.081.593	12.166,11	1.781.782,74
227	01/06/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.111.814	12.457,53	1.824.461,96
228	01/07/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.142.036	12.750,95	1.867.434,60
229	01/08/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.172.258	13.046,39	1.910.702,68
230	01/09/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.202.480	13.343,86	1.954.268,23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
231	01/10/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.232.701	13.643,37	1.998.133,29
232	01/11/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.262.923	13.944,94	2.042.299,92
233	01/12/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.293.145	14.248,59	2.086.770,20
234	01/01/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.323.366	14.554,32	2.131.546,21
235	01/02/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.353.588	14.862,15	2.176.630,05
236	01/03/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.383.810	15.172,11	2.222.023,85
237	01/04/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.414.031	15.484,19	2.267.729,73
238	01/05/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.444.253	15.798,42	2.313.749,84
239	01/06/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.474.475	16.114,80	2.360.086,33
240	01/07/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.504.696	16.433,37	2.406.741,39
241	01/08/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.535.733	16.759,72	2.454.537,90
242	01/09/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.566.770	17.088,33	2.502.663,02
243	01/10/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.597.807	17.419,19	2.551.119,00
244	01/11/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.628.844	17.752,32	2.599.908,11
245	01/12/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.659.880	18.087,75	2.649.032,65
246	01/01/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.696.282	18.462,36	2.703.896,64
247	01/02/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.732.684	18.839,55	2.759.137,82
248	01/03/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.769.085	19.219,33	2.814.758,78
249	01/04/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.805.487	19.601,73	2.870.762,14
250	01/05/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.841.889	19.986,75	2.927.150,52
251	01/06/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.878.290	20.374,42	2.983.926,57
252	01/07/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.914.692	20.764,76	3.041.092,96
253	01/08/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.951.093	21.157,78	3.098.652,37
254	01/09/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.987.495	21.553,50	3.156.607,50
255	01/10/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.023.897	21.951,94	3.214.961,07
256	01/11/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.060.298	22.353,12	3.273.715,82



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
257	01/12/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.096.700	22.757,06	3.332.874,51
258	01/01/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.133.102	23.163,77	3.392.439,91
259	01/02/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.169.503	23.573,29	3.452.414,83
260	01/03/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.205.905	23.985,61	3.512.802,07
261	01/04/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.242.306	24.400,78	3.573.604,48
262	01/05/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.278.708	24.818,79	3.634.824,90
263	01/06/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.315.110	25.239,68	3.696.466,21
264	01/07/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.351.511	25.663,47	3.758.531,31
265	01/08/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.388.824	26.096,43	3.821.940,80
266	01/09/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.426.138	26.532,37	3.885.786,23
267	01/10/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.463.451	26.971,31	3.950.070,60
268	01/11/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.500.764	27.413,26	4.014.796,92
269	01/12/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.538.077	27.858,26	4.079.968,24
270	01/01/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.575.390	28.306,31	4.145.587,61
271	01/02/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.612.703	28.757,44	4.211.658,11
272	01/03/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.650.016	29.211,68	4.278.182,85
273	01/04/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.688.492	29.677,03	4.346.336,31
274	01/05/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.726.969	30.145,59	4.414.958,33
275	01/06/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.765.445	30.617,36	4.484.052,12
276	01/07/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.803.922	31.092,38	4.553.620,93
277	01/08/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.842.398	31.570,67	4.623.668,03
278	01/09/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.880.874	32.052,24	4.694.196,70
279	01/10/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.919.351	32.537,13	4.765.210,26
280	01/11/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.957.827	33.025,35	4.836.712,04
281	01/12/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.996.304	33.516,92	4.908.705,39
282	01/01/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.040.553	34.051,56	4.987.005,77



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
283	01/02/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.084.801	34.589,88	5.065.844,47
284	01/03/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.129.050	35.131,89	5.145.225,18
285	01/04/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.173.299	35.677,63	5.225.151,63
286	01/05/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.217.548	36.227,13	5.305.627,58
287	01/06/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.261.797	36.780,40	5.386.656,80
288	01/07/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.306.045	37.337,48	5.468.243,10
289	01/08/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.351.402	37.906,00	5.551.505,71
290	01/09/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.396.759	38.478,43	5.635.340,75
291	01/10/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.442.115	39.054,79	5.719.752,15
292	01/11/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.487.472	39.635,12	5.804.743,88
293	01/12/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.532.829	40.219,44	5.890.319,93
294	01/01/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.584.988	40.854,54	5.983.333,46
295	01/02/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.637.147	41.494,01	6.076.986,46
296	01/03/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.689.305	42.137,87	6.171.283,32
297	01/04/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.741.464	42.786,17	6.266.228,48
298	01/05/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.793.623	43.438,91	6.361.826,38
299	01/06/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.845.782	44.096,15	6.458.081,52
300	01/07/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.897.941	44.757,90	6.554.998,41
301	01/08/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.950.100	45.424,21	6.652.581,61
302	01/09/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.002.259	46.095,09	6.750.835,69
303	01/10/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.054.418	46.770,59	6.849.765,27
304	01/11/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.106.577	47.450,73	6.949.374,99
305	01/12/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.158.736	48.135,55	7.049.669,53
306	01/01/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.221.329	48.896,80	7.161.158,60
307	01/02/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.283.921	49.663,29	7.273.414,16
308	01/03/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.346.513	50.435,04	7.386.441,47



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
309	01/04/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.409.105	51.212,11	7.500.245,85
310	01/05/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.471.698	51.994,51	7.614.832,63
311	01/06/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.534.290	52.782,30	7.730.207,20
312	01/07/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.596.882	53.575,50	7.846.374,97
313	01/08/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.661.038	54.384,90	7.964.915,65
314	01/09/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.725.194	55.199,87	8.084.271,30
315	01/10/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.789.350	56.020,44	8.204.447,52
316	01/11/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.853.505	56.846,65	8.325.449,95
317	01/12/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.917.661	57.678,54	8.447.284,27
318	01/01/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	4.992.087	58.586,76	8.580.297,07
319	01/02/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.066.513	59.501,22	8.714.224,33
320	01/03/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.140.939	60.421,97	8.849.072,34
321	01/04/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.215.365	61.349,05	8.984.847,43
322	01/05/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.289.791	62.282,51	9.121.555,98
323	01/06/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.364.217	63.222,38	9.259.204,40
324	01/07/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.438.643	64.168,71	9.397.799,15
325	01/08/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.513.070	65.121,55	9.537.346,74
326	01/09/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.587.496	66.080,94	9.677.853,72
327	01/10/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.661.922	67.046,92	9.819.326,68
328	01/11/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.736.348	68.019,55	9.961.772,27
329	01/12/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.810.774	68.998,86	10.105.197,17
330	01/01/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	5.888.986	70.010,94	10.253.420,66
331	01/02/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	5.967.199	71.029,98	10.402.663,19
332	01/03/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	6.045.411	72.056,02	10.552.931,76
333	01/04/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.126.069	73.105,93	10.706.695,54



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
334	01/05/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.206.727	74.163,05	10.861.516,44
335	01/06/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.287.385	75.227,45	11.017.401,74
336	01/07/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.368.043	76.299,16	11.174.358,75
337	01/08/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.450.801	77.392,68	11.334.510,02
338	01/09/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.533.560	78.493,72	11.495.762,33
339	01/10/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.616.318	79.602,33	11.658.123,25
340	01/11/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.699.077	80.718,56	11.821.600,40
341	01/12/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.781.836	81.842,47	11.986.201,46
342	01/01/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	6.874.061	83.039,18	12.161.465,50
343	01/02/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	6.966.285	84.244,12	12.337.934,48
344	01/03/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.058.510	85.457,35	12.515.616,69
345	01/04/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.150.735	86.678,91	12.694.520,46
346	01/05/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.242.960	87.908,87	12.874.654,19
347	01/06/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.335.185	89.147,29	13.056.026,34
348	01/07/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.427.410	90.394,23	13.238.645,43
349	01/08/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.519.635	91.649,73	13.422.520,02
350	01/09/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.611.859	92.913,87	13.607.658,75
351	01/10/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.704.084	94.186,70	13.794.070,31
352	01/11/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.796.309	95.468,28	13.981.763,45
353	01/12/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.888.534	96.758,67	14.170.746,98
354	01/01/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	7.990.762	98.126,71	14.371.102,05
355	01/02/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.092.991	99.504,15	14.572.834,56
356	01/03/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.195.219	100.891,06	14.775.953,98
357	01/04/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.297.447	102.287,50	14.980.469,84
358	01/05/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.399.676	103.693,55	15.186.391,75



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+TA+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
359	01/06/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.501.904	105.109,26	15.393.729,37
360	01/07/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.604.133	106.534,71	15.602.492,44
361	01/08/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.709.518	107.991,66	15.815.869,12
362	01/09/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.814.903	109.458,62	16.030.712,76
363	01/10/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.920.288	110.935,67	16.247.033,45
364	01/11/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	9.025.673	112.422,88	16.464.841,35
365	01/12/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	9.131.058	113.920,31	16.684.146,68
366	01/01/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.242.915	115.472,53	16.911.476,87
367	01/02/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.354.773	117.035,42	17.140.369,95
368	01/03/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.466.631	118.609,06	17.370.836,67
369	01/04/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.578.488	120.193,52	17.602.887,85
370	01/05/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.690.346	121.788,88	17.836.534,39
371	01/06/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.802.204	123.395,20	18.071.787,25
372	01/07/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.914.061	125.012,56	18.308.657,47
373	01/08/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.025.919	126.641,04	18.547.156,17
374	01/09/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.137.777	128.280,72	18.787.294,55
375	01/10/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.249.634	129.931,67	19.029.083,88
376	01/11/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.361.492	131.593,97	19.272.535,51
377	01/12/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.473.350	133.267,70	19.517.660,87
378	01/01/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.591.917	134.999,07	19.771.227,35
379	01/02/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.710.484	136.742,34	20.026.537,10
380	01/03/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.829.052	138.497,59	20.283.602,10
381	01/04/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.947.619	140.264,92	20.542.434,43
382	01/05/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.066.187	142.044,39	20.803.046,23
383	01/06/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.184.754	143.836,09	21.065.449,73



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
384	01/07/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.303.321	145.640,12	21.329.657,26
385	01/08/2014	PELDA	1101	3.301.100	462.154	3.763.254	122.306	11.425.627	147.482,25	21.599.445,27
386	01/09/2014	PELDA	1101	3.301.100	462.154	3.763.254	122.306	11.547.933	149.337,04	21.871.088,07
387	01/10/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.674.062	151.230,87	22.148.448,26
388	01/11/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.800.192	153.137,72	22.427.715,30
389	01/12/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.926.321	155.057,68	22.708.902,30
390	01/01/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.060.020	157.042,88	22.999.643,81
391	01/02/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.193.718	159.041,73	23.292.384,17
392	01/03/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.327.417	161.054,32	23.587.137,12
393	01/04/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.461.115	163.080,75	23.883.916,50
394	01/05/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.594.814	165.121,10	24.182.736,23
395	01/06/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.728.513	167.175,49	24.483.610,35
396	01/07/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.862.211	169.244,00	24.786.552,98
397	01/08/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.995.910	171.326,73	25.091.578,34

2. Menghitung menggunakan formulasi manfaat pasti $\{(0,60 \times MI_1 \times P_1) + (0,60 \times MI_2 \times P_2)\}$ sejak TMT pengangkatan sampai dengan bulan Desember 2012.

- 1) Dari akumulasi premi yang dihitung sebagaimana huruf b, maka pada posisi 1 Desember 2012 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Gaji pokok sebesar Rp2.844.400,00;
 - b) Status keluarga 1 istri dan 1 anak;
 - c) Pangkat Pelda;
 - d) Masa Kerja Gaji (MKG) 29;
 - e) Akumulasi iuran + pengembangan pada posisi Desember 2012 sebesar Rp16.684.146,68;
 - f) Akumulasi iuran + pengembangan pada posisi Agustus 2015 sebesar Rp25.091.578,34;

g. Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

g) Dengan pangkat dan MKG yang sama, dikonversi ke peraturan gaji tahun 1997, maka diperoleh gaji pokok sebesar Rp405.100,00.

2) Menghitung MI_1 (tahun dan bulan TMB Desember 2000 dikurangi tahun dan bulan TMB pengangkatan):

Agustus 1982 s.d Desember 2000= 18 tahun 5 bulan atau 221 bulan.

3) Menghitung MI_2 (tahun dan bulan TMB Desember 2012 dikurangi tahun dan bulan TMB Januari 2001):

Januari 2001 s.d Desember 2012= 12 tahun 0 bulan atau 144 bulan.

4) Perhitungan manfaat pasti sampai dengan Desember 2012:

$$\begin{aligned} &= \{(0,60 \times MI_1 \times P_1) + (0,60 \times MI_2 \times P_2)\} \\ &= \{(0,60 \times (221/12) \times (405.100 + 40.510 + 8.102) \\ &\quad (0,60 \times (144/12) \times (2.844.400 + 284.440 + 56.888)) \} \\ &= (0,60 \times 18,42 \times 453.712) + (0,60 \times 12 \times 3.185.728) \\ &= Rp5.014.425,02 + Rp22.937.241,60 \\ &= Rp27.951.666,62 \end{aligned}$$

3. Menghitung selisih akumulasi iuran+pengembangan pada posisi 1 Agustus 2015 dengan posisi 1 Desember 2012 dan menambahkan hasil perhitungan pada huruf c angka 4):

1) Akumulasi iuran + pengembangan pada huruf c. 1) f) dikurangi akumulasi iuran+pengembangan pada huruf c angka 1) butir e):

$$\begin{aligned} &= Rp 25.091.578,34 - 16.684.146,68 \\ &= Rp 8.407.431,66 \end{aligned}$$

2) Menjumlahkan hasil perhitungan d. 1) dengan hasil perhitungan pada huruf c angka 4):

$$\begin{aligned} &= Rp27.951.666,62 + Rp8.407.431,66 \\ &= Rp36.359.098,28 \end{aligned}$$

4. Menghitung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

4. Menghitung indeks dari perbandingan hasil akumulasi iuran+pengembangan dengan penghasilan terakhir, melalui penyesuaian akumulasi premi berdasarkan hasil perhitungan pada huruf d angka 2).

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01/08/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	936	6,44	945,08
2	01/09/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	1.872	12,91	1.899,33
3	01/10/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	2.808	19,44	2.862,84
4	01/11/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	3.744	26,01	3.835,70
5	01/12/1982	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	4.680	32,62	4.818,00
6	01/01/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	5.616	39,28	5.809,82
7	01/02/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	6.552	45,98	6.811,28
8	01/03/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	7.488	52,74	7.822,44
9	01/04/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	8.424	59,53	8.843,42
10	01/05/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	9.360	66,38	9.874,30
11	01/06/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	10.296	73,27	10.915,19
12	01/07/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	11.232	80,21	11.966,18
13	01/08/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	12.168	87,19	13.027,36
14	01/09/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	13.104	94,23	14.098,84
15	01/10/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	14.040	101,31	15.180,71
16	01/11/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	14.976	108,44	16.273,08
17	01/12/1983	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	15.912	115,62	17.376,05
18	01/01/1984	PRADA	1000	14.400	14.400	28.800	936	16.848	122,85	18.489,72
19	01/02/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	17.924	131,10	19.755,96
20	01/03/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	19.001	139,40	21.034,48
21	01/04/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	20.077	147,76	22.325,41
22	01/05/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	21.154	156,17	23.628,87



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	01/06/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	22.230	164,65	24.944,97
24	01/07/1984	PRADA	1000	14.400	18.720	33.120	1.076	23.306	173,18	26.273,84
25	01/08/1984	PRADA	1000	15.600	20.280	35.880	1.166	24.473	182,39	27.706,17
26	01/09/1984	PRADA	1000	15.600	20.280	35.880	1.166	25.639	191,66	29.152,40
27	01/10/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	26.872	201,46	30.680,60
28	01/11/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	28.105	211,32	32.223,62
29	01/12/1984	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	29.339	221,25	33.781,61
30	01/01/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	30.572	231,25	35.354,72
31	01/02/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	31.806	241,32	36.943,10
32	01/03/1985	PRATU	1000	16.500	21.450	37.950	1.233	33.039	251,46	38.546,88
33	01/04/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	34.521	263,38	40.417,26
34	01/05/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	36.003	275,38	42.305,78
35	01/06/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	37.485	287,46	44.212,63
36	01/07/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	38.967	299,63	46.137,98
37	01/08/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	40.449	311,87	48.082,00
38	01/09/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	41.931	324,21	50.044,89
39	01/10/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	43.413	336,62	52.026,83
40	01/11/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	44.895	349,13	54.027,99
41	01/12/1985	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	46.377	361,72	56.048,57
42	01/01/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	47.859	374,39	58.088,76
43	01/02/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	49.341	387,16	60.148,74
44	01/03/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	50.823	400,01	62.228,71
45	01/04/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	52.305	412,94	64.328,85
46	01/05/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	53.787	425,97	66.449,38
47	01/06/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	55.269	439,09	68.590,48
48	01/07/1986	PRATU	1000	45.600	0	45.600	1.482	56.751	452,30	70.752,35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49	01/08/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	58.360	466,47	73.063,18
50	01/09/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	59.968	480,73	75.396,42
51	01/10/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	61.577	495,10	77.752,31
52	01/11/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	63.186	509,56	80.131,05
53	01/12/1986	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	64.795	524,13	82.532,88
54	01/01/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	66.403	538,79	84.958,00
55	01/02/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	68.012	553,55	87.406,66
56	01/03/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	69.621	568,42	89.879,07
57	01/04/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	71.230	583,39	92.375,47
58	01/05/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	72.838	598,46	94.896,10
59	01/06/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	74.447	613,63	97.441,18
60	01/07/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	76.056	628,91	100.010,95
61	01/08/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	77.665	644,30	102.605,66
62	01/09/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	79.273	659,79	105.225,54
63	01/10/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	80.882	675,38	107.870,84
64	01/11/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	82.491	691,09	110.541,80
65	01/12/1987	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	84.100	706,90	113.238,68
66	01/01/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	85.708	722,82	115.961,73
67	01/02/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	87.317	738,85	118.711,20
68	01/03/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	88.926	754,99	121.487,34
69	01/04/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	90.535	771,24	124.290,42
70	01/05/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	92.143	787,60	127.120,70
71	01/06/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	93.752	804,07	129.978,43
72	01/07/1988	PRATU	1000	49.500	0	49.500	1.609	95.361	820,66	132.863,89
73	01/08/1988	PRATU	1000	53.300	0	53.300	1.732	97.093	838,21	135.902,05
74	01/09/1988	PRATU	1000	53.300	0	53.300	1.732	98.825	855,89	138.969,69



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75	01/10/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	100.684	874,55	142.195,06
76	01/11/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	102.543	893,34	145.451,74
77	01/12/1988	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	104.402	912,27	148.740,01
78	01/01/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	106.261	931,32	152.060,18
79	01/02/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	108.120	950,50	155.412,57
80	01/03/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	109.979	969,82	158.797,48
81	01/04/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	111.838	989,27	162.215,23
82	01/05/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	113.697	1.008,85	165.666,15
83	01/06/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	115.556	1.028,56	169.150,55
84	01/07/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	117.415	1.048,42	172.668,75
85	01/08/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	119.274	1.068,40	176.221,09
86	01/09/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	121.133	1.088,53	179.807,90
87	01/10/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	122.992	1.108,79	183.429,50
88	01/11/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	124.851	1.129,20	187.086,25
89	01/12/1989	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	126.710	1.149,74	190.778,47
90	01/01/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	128.569	1.170,43	194.506,52
91	01/02/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	130.428	1.191,25	198.270,74
92	01/03/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	132.287	1.212,22	202.071,48
93	01/04/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	134.146	1.233,34	205.909,10
94	01/05/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	136.005	1.254,60	209.783,95
95	01/06/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	137.864	1.276,01	213.696,40
96	01/07/1990	KOPDA	1000	57.200	0	57.200	1.859	139.723	1.297,56	217.646,80
97	01/08/1990	KOPDA	1000	61.600	0	61.600	2.002	141.725	1.320,24	221.779,93
98	01/09/1990	KOPDA	1000	61.600	0	61.600	2.002	143.727	1.343,08	225.953,15
99	01/10/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	145.882	1.367,13	230.321,10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100	01/11/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	148.037	1.391,34	234.731,42
101	01/12/1990	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	150.192	1.415,72	239.184,54
102	01/01/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	152.346	1.440,27	243.680,86
103	01/02/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	154.501	1.464,99	248.220,81
104	01/03/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	156.656	1.489,87	252.804,81
105	01/04/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	158.811	1.514,93	257.433,28
106	01/05/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	160.965	1.540,16	262.106,66
107	01/06/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	163.120	1.565,56	266.825,38
108	01/07/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	165.275	1.591,14	271.589,89
109	01/08/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	167.430	1.616,89	276.400,62
110	01/09/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	169.584	1.642,82	281.258,03
111	01/10/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	171.739	1.668,93	286.162,57
112	01/11/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	173.894	1.695,22	291.114,69
113	01/12/1991	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	176.049	1.721,68	296.114,86
114	01/01/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	178.203	1.748,34	301.163,54
115	01/02/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	180.358	1.775,17	306.261,21
116	01/03/1992	KOPTU	1000	66.300	0	66.300	2.155	182.513	1.802,19	311.408,34
117	01/04/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	185.779	1.837,03	317.727,69
118	01/05/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	189.045	1.872,12	324.108,36
119	01/06/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	192.312	1.907,44	330.550,93
120	01/07/1992	KOPTU	1000	100.500	0	100.500	3.266	195.578	1.943,01	337.056,01
121	01/08/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	199.091	1.980,53	343.873,61
122	01/09/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	202.604	2.018,29	350.757,35
123	01/10/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	206.118	2.056,32	357.707,87
124	01/11/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	209.631	2.094,61	364.725,84
125	01/12/1992	KOPTU	1000	108.100	0	108.100	3.513	213.144	2.133,17	371.811,90
126	01/01/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	218.124	2.182,07	380.447,67



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+TA+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127	01/02/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	223.104	2.231,31	389.167,22
128	01/03/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	228.084	2.280,89	397.971,38
129	01/04/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	233.064	2.330,81	406.860,96
130	01/05/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	238.044	2.381,07	415.836,79
131	01/06/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	243.024	2.431,68	424.899,71
132	01/07/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	248.004	2.482,63	434.050,56
133	01/08/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	252.984	2.533,94	443.290,19
134	01/09/1993	KOPTU	1100	139.300	13.930	153.230	4.980	257.964	2.585,59	452.619,47
135	01/10/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	263.058	2.638,39	462.154,78
136	01/11/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	268.153	2.691,56	471.782,60
137	01/12/1993	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	273.247	2.745,09	481.503,84
138	01/01/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	278.341	2.798,98	491.319,39
139	01/02/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	283.436	2.853,25	501.230,18
140	01/03/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	288.530	2.907,89	511.237,13
141	01/04/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	293.625	2.962,90	521.341,17
142	01/05/1994	KOPKA	1100	142.500	14.250	156.750	5.094	298.719	3.018,30	531.543,25
143	01/06/1994	KOPKA	1100	142.500	17.100	159.600	5.187	303.906	3.074,71	541.937,82
144	01/07/1994	SERDA	1100	147.000	17.640	164.640	5.351	309.257	3.132,64	552.598,64
145	01/08/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	314.939	3.193,24	563.697,35
146	01/09/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	320.621	3.254,25	574.903,74
147	01/10/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	326.303	3.315,69	586.218,87
148	01/11/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	331.985	3.377,55	597.643,77
149	01/12/1994	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	337.667	3.439,83	609.179,53
150	01/01/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	343.349	3.502,55	620.827,21
151	01/02/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	349.031	3.565,69	632.587,90
152	01/03/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	354.713	3.629,27	644.462,69



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+TA+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
153	01/04/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	360.395	3.693,28	656.452,70
154	01/05/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	366.077	3.757,74	668.559,05
155	01/06/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	371.759	3.822,64	680.782,85
156	01/07/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	377.441	3.887,98	693.125,25
157	01/08/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	383.123	3.953,78	705.587,41
158	01/09/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	388.805	4.020,02	718.170,48
159	01/10/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	394.487	4.086,73	730.875,63
160	01/11/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	400.169	4.153,89	743.704,06
161	01/12/1995	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	405.851	4.221,51	756.656,95
162	01/01/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	411.534	4.289,59	769.735,51
163	01/02/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	417.216	4.358,15	782.940,97
164	01/03/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	422.898	4.427,18	796.274,56
165	01/04/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	428.580	4.496,68	809.737,51
166	01/05/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	434.262	4.566,66	823.331,08
167	01/06/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	439.944	4.637,12	837.056,55
168	01/07/1996	SERDA	1100	156.100	18.732	174.832	5.682	445.626	4.708,06	850.915,19
169	01/08/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	451.639	4.781,77	865.242,74
170	01/09/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	457.652	4.855,98	879.709,30
171	01/10/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	463.666	4.930,71	894.316,23
172	01/11/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	469.679	5.005,95	909.064,87
173	01/12/1996	SERDA	1100	165.200	19.824	185.024	6.013	475.692	5.081,71	923.956,62
174	01/01/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	484.559	5.177,61	941.874,29
175	01/02/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	493.426	5.274,16	959.965,82
176	01/03/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	502.293	5.371,38	978.232,87
177	01/04/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	511.160	5.469,27	996.677,16
178	01/05/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	520.027	5.567,83	1.015.300,40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
179	01/06/1997	SERDA	1100	243.600	29.232	272.832	8.867	528.894	5.667,07	1.034.104,33
180	01/07/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	538.027	5.768,82	1.053.359,01
181	01/08/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	547.160	5.871,27	1.072.800,50
182	01/09/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	556.293	5.974,42	1.092.430,62
183	01/10/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	565.425	6.078,29	1.112.251,20
184	01/11/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	574.558	6.182,86	1.132.264,09
185	01/12/1997	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	583.691	6.288,16	1.152.471,15
186	01/01/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	592.824	6.394,18	1.172.874,27
187	01/02/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	601.956	6.500,92	1.193.475,34
188	01/03/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	611.089	6.608,40	1.214.276,30
189	01/04/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	620.222	6.716,63	1.235.279,08
190	01/05/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	629.355	6.825,59	1.256.485,63
191	01/06/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	638.488	6.935,30	1.277.897,94
192	01/07/1998	SERTU	1100	250.900	30.108	281.008	9.133	647.620	7.045,77	1.299.518,00
193	01/08/1998	SERTU	1100	263.500	31.620	295.120	9.591	657.212	7.160,15	1.321.810,92
194	01/09/1998	SERTU	1100	263.500	31.620	295.120	9.591	666.803	7.275,32	1.344.320,13
195	01/10/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	676.566	7.392,46	1.367.220,68
196	01/11/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	686.328	7.510,40	1.390.343,42
197	01/12/1998	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	696.091	7.629,15	1.413.690,50
198	01/01/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	705.854	7.748,72	1.437.264,11
199	01/02/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	715.616	7.869,11	1.461.066,43
200	01/03/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	725.379	7.990,33	1.485.099,70
201	01/04/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	735.142	8.112,38	1.509.366,15
202	01/05/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	744.905	8.235,27	1.533.868,04
202	01/05/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	744.905	8.235,27	1.533.868,04
203	01/06/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	754.667	8.359,01	1.558.607,66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
204	01/07/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	764.430	8.483,59	1.583.587,31
205	01/08/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	774.193	8.609,04	1.608.809,33
206	01/09/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	783.955	8.735,34	1.634.276,06
207	01/10/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	793.718	8.862,52	1.659.989,88
208	01/11/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	803.481	8.990,56	1.685.953,18
209	01/12/1999	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	813.243	9.119,49	1.712.168,39
210	01/01/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	823.006	9.249,31	1.738.637,96
211	01/02/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	832.769	9.380,01	1.765.364,34
212	01/03/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	842.531	9.511,62	1.792.350,03
213	01/04/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	852.294	9.644,13	1.819.597,54
214	01/05/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	862.057	9.777,55	1.847.109,43
215	01/06/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	871.819	9.911,89	1.874.888,24
216	01/07/2000	SERTU	1101	263.500	36.890	300.390	9.763	881.582	10.047,16	1.902.936,58
217	01/08/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	891.834	10.186,71	1.931.750,86
218	01/09/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	902.086	10.327,22	1.960.844,71
219	01/10/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	912.337	10.468,70	1.990.220,83
220	01/11/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	922.589	10.611,16	2.019.881,98
221	01/12/2000	SERTU	1101	276.700	38.738	315.438	10.252	932.841	10.754,59	2.049.830,91
222	01/01/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	962.277	11.030,90	2.099.441,04
223	01/02/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	991.713	11.309,11	2.149.532,51
224	01/03/2001	SERTU	1101	794.500	111.230	905.730	29.436	1.021.149	11.589,24	2.200.109,99
225	01/04/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.051.371	11.876,69	2.251.971,28
226	01/05/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.081.593	12.166,11	2.304.335,74
227	01/06/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.111.814	12.457,53	2.357.208,26
228	01/07/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.142.036	12.750,95	2.410.593,78



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
229	01/08/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.172.258	13.046,39	2.464.497,26
230	01/09/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.202.480	13.343,86	2.518.923,74
231	01/10/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.232.701	13.643,37	2.573.878,28
232	01/11/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.262.923	13.944,94	2.629.366,02
233	01/12/2001	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.293.145	14.248,59	2.685.392,12
234	01/01/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.323.366	14.554,32	2.741.961,81
235	01/02/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.353.588	14.862,15	2.799.080,36
236	01/03/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.383.810	15.172,11	2.856.753,10
237	01/04/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.414.031	15.484,19	2.914.985,41
238	01/05/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.444.253	15.798,42	2.973.782,71
239	01/06/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.474.475	16.114,80	3.033.150,48
240	01/07/2002	SERKA	1101	815.700	114.198	929.898	30.222	1.504.696	16.433,37	3.093.094,26
241	01/08/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.535.733	16.759,72	3.154.442,66
242	01/09/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.566.770	17.088,33	3.216.386,28
243	01/10/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.597.807	17.419,19	3.278.930,90
244	01/11/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.628.844	17.752,32	3.342.082,35
245	01/12/2002	SERKA	1101	837.700	117.278	954.978	31.037	1.659.880	18.087,75	3.405.846,53
246	01/01/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.696.282	18.462,36	3.475.646,26
247	01/02/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.732.684	18.839,55	3.546.123,22
248	01/03/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.769.085	19.219,33	3.617.283,98
249	01/04/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.805.487	19.601,73	3.689.135,17
250	01/05/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.841.889	19.986,75	3.761.683,48
251	01/06/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.878.290	20.374,42	3.834.935,69
252	01/07/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.914.692	20.764,76	3.908.898,63
253	01/08/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.951.093	21.157,78	3.983.579,18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
254	01/09/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	1.987.495	21.553,50	4.058.984,31
255	01/10/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.023.897	21.951,94	4.135.121,06
256	01/11/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.060.298	22.353,12	4.211.996,52
257	01/12/2003	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.096.700	22.757,06	4.289.617,85
258	01/01/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.133.102	23.163,77	4.367.992,29
259	01/02/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.169.503	23.573,29	4.447.127,16
260	01/03/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.205.905	23.985,61	4.527.029,83
261	01/04/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.242.306	24.400,78	4.607.707,74
262	01/05/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.278.708	24.818,79	4.689.168,43
263	01/06/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.315.110	25.239,68	4.771.419,48
264	01/07/2004	SERKA	1101	982.500	137.550	1.120.050	36.402	2.351.511	25.663,47	4.854.468,56
265	01/08/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.388.824	26.096,43	4.939.243,70
266	01/09/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.426.138	26.532,37	5.024.841,35
267	01/10/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.463.451	26.971,31	5.111.269,51
268	01/11/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.500.764	27.413,26	5.198.536,23
269	01/12/2004	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.538.077	27.858,26	5.286.649,65
270	01/01/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.575.390	28.306,31	5.375.617,98
271	01/02/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.612.703	28.757,44	5.465.449,52
272	01/03/2005	SERKA	1101	1.007.100	140.994	1.148.094	37.313	2.650.016	29.211,68	5.556.152,64
273	01/04/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.688.492	29.677,03	5.648.910,46
274	01/05/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.726.969	30.145,59	5.742.568,25
275	01/06/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.765.445	30.617,36	5.837.134,75
276	01/07/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.803.922	31.092,38	5.932.618,77
277	01/08/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.842.398	31.570,67	6.029.029,22
278	01/09/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.880.874	32.052,24	6.126.375,08



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
279	01/10/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.919.351	32.537,13	6.224.665,43
280	01/11/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.957.827	33.025,35	6.323.909,43
281	01/12/2005	SERMA	1101	1.038.500	145.390	1.183.890	38.476	2.996.304	33.516,92	6.424.116,34
282	01/01/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.040.553	34.051,56	6.531.123,90
283	01/02/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.084.801	34.589,88	6.639.169,68
284	01/03/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.129.050	35.131,89	6.748.263,77
285	01/04/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.173.299	35.677,63	6.858.416,34
286	01/05/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.217.548	36.227,13	6.969.637,65
287	01/06/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.261.797	36.780,40	7.081.938,07
288	01/07/2006	SERMA	1101	1.194.300	167.202	1.361.502	44.249	3.306.045	37.337,48	7.195.328,08
289	01/08/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.351.402	37.906,00	7.310.936,79
290	01/09/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.396.759	38.478,43	7.427.667,17
291	01/10/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.442.115	39.054,79	7.545.530,13
292	01/11/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.487.472	39.635,12	7.664.536,64
293	01/12/2006	SERMA	1101	1.224.200	171.388	1.395.588	45.357	3.532.829	40.219,44	7.784.697,80
294	01/01/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.584.988	40.854,54	7.912.893,19
295	01/02/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.637.147	41.494,01	8.042.332,38
296	01/03/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.689.305	42.137,87	8.173.027,45
297	01/04/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.741.464	42.786,17	8.304.990,58
298	01/05/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.793.623	43.438,91	8.438.234,06
299	01/06/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.845.782	44.096,15	8.572.770,33
300	01/07/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.897.941	44.757,90	8.708.611,92
301	01/08/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	3.950.100	45.424,21	8.845.771,51
302	01/09/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.002.259	46.095,09	8.984.261,87
303	01/10/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.054.418	46.770,59	9.124.095,93



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
304	01/11/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.106.577	47.450,73	9.265.286,71
305	01/12/2007	SERMA	1101	1.407.800	197.092	1.604.892	52.159	4.158.736	48.135,55	9.407.847,38
306	01/01/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.221.329	48.896,80	9.562.325,74
307	01/02/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.283.921	49.663,29	9.718.302,92
308	01/03/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.346.513	50.435,04	9.875.793,45
309	01/04/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.409.105	51.212,11	10.034.812,02
310	01/05/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.471.698	51.994,51	10.195.373,45
311	01/06/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.534.290	52.782,30	10.357.492,71
312	01/07/2008	SERMA	1101	1.689.400	236.516	1.925.916	62.592	4.596.882	53.575,50	10.521.184,92
313	01/08/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.661.038	54.384,90	10.688.044,02
314	01/09/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.725.194	55.199,87	10.856.522,06
315	01/10/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.789.350	56.020,44	11.026.634,74
316	01/11/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.853.505	56.846,65	11.198.397,92
317	01/12/2008	SERMA	1101	1.731.600	242.424	1.974.024	64.156	4.917.661	57.678,54	11.371.827,62
318	01/01/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	4.992.087	58.586,76	11.557.309,91
319	01/02/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.066.513	59.501,22	11.744.591,82
320	01/03/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.140.939	60.421,97	11.933.690,83
321	01/04/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.215.365	61.349,05	12.124.624,55
322	01/05/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.289.791	62.282,51	12.317.410,78
323	01/06/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.364.217	63.222,38	12.512.067,51
324	01/07/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.438.643	64.168,71	12.708.612,87
325	01/08/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.513.070	65.121,55	12.907.065,21
326	01/09/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.587.496	66.080,94	13.107.443,00
327	01/10/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.661.922	67.046,92	13.309.764,95
328	01/11/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.736.348	68.019,55	13.514.049,90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
329	01/12/2009	SERMA	1101	2.008.800	281.232	2.290.032	74.426	5.810.774	68.998,86	13.720.316,91
330	01/01/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	5.888.986	70.010,94	13.932.408,46
331	01/02/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	5.967.199	71.029,98	14.146.557,80
332	01/03/2010	SERMA	1101	2.111.000	295.540	2.406.540	78.213	6.045.411	72.056,02	14.362.784,91
333	01/04/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.126.069	73.105,93	14.583.578,97
334	01/05/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.206.727	74.163,05	14.806.515,27
335	01/06/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.287.385	75.227,45	15.031.614,58
336	01/07/2010	PELDA	1101	2.177.000	304.780	2.481.780	80.658	6.368.043	76.299,16	15.258.897,90
337	01/08/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.450.801	77.392,68	15.490.507,54
338	01/09/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.533.560	78.493,72	15.724.364,35
339	01/10/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.616.318	79.602,33	15.960.490,14
340	01/11/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.699.077	80.718,56	16.198.906,91
341	01/12/2010	PELDA	1101	2.233.700	312.718	2.546.418	82.759	6.781.836	81.842,47	16.439.636,90
342	01/01/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	6.874.061	83.039,18	16.692.260,67
343	01/02/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	6.966.285	84.244,12	16.947.335,50
344	01/03/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.058.510	85.457,35	17.204.885,17
345	01/04/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.150.735	86.678,91	17.464.933,69
346	01/05/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.242.960	87.908,87	17.727.505,31
347	01/06/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.335.185	89.147,29	17.992.624,50
348	01/07/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.427.410	90.394,23	18.260.315,99
349	01/08/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.519.635	91.649,73	18.530.604,74
350	01/09/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.611.859	92.913,87	18.803.515,93
351	01/10/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.704.084	94.186,70	19.079.075,03
352	01/11/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.796.309	95.468,28	19.357.307,71
353	01/12/2011	PELDA	1101	2.489.200	348.488	2.837.688	92.225	7.888.534	96.758,67	19.638.239,91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
354	01/01/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	7.990.762	98.126,71	19.931.998,40
355	01/02/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.092.991	99.504,15	20.228.607,05
356	01/03/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.195.219	100.891,06	20.528.093,52
357	01/04/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.297.447	102.287,50	20.830.485,73
358	01/05/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.399.676	103.693,55	21.135.811,88
359	01/06/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.501.904	105.109,26	21.444.100,42
360	01/07/2012	PELDA	1101	2.759.200	386.288	3.145.488	102.228	8.604.133	106.534,71	21.755.380,11
361	01/08/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.709.518	107.991,66	22.072.867,24
362	01/09/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.814.903	109.458,62	22.393.434,77
363	01/10/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	8.920.288	110.935,67	22.717.112,57
364	01/11/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	9.025.673	112.422,88	23.043.930,83
365	01/12/2012	PELDA	1101	2.844.400	398.216	3.242.616	105.385	9.131.058	113.920,31	23.373.920,02
366	01/01/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.242.915	115.472,53	23.713.646,33
367	01/02/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.354.773	117.035,42	24.056.668,81
368	01/03/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.466.631	118.609,06	24.403.019,43
369	01/04/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.578.488	120.193,52	24.752.730,49
370	01/05/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.690.346	121.788,88	25.105.834,59
371	01/06/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.802.204	123.395,20	25.462.364,65
372	01/07/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	9.914.061	125.012,56	25.822.353,92
373	01/08/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.025.919	126.641,04	26.185.835,94
374	01/09/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.137.777	128.280,72	26.552.844,62
375	01/10/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.249.634	129.931,67	26.923.414,16
376	01/11/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.361.492	131.593,97	27.297.579,13
377	01/12/2013	PELDA	1101	3.019.100	422.674	3.441.774	111.858	10.473.350	133.267,70	27.675.374,39
378	01/01/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.591.917	134.999,07	28.063.610,04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

MASA IURAN	TGL IURAN	PANGKAT	KODE JIWA	Gaji Pokok	TPP + TI+TA	GP+TI+T A+TPP	IURAN SEBULAN	AKUMULASI IURAN	BUNGA PERBULAN (%)	AKUMULASI + PENGEMBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
379	01/02/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.710.484	136.742,34	28.455.612,50
380	01/03/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.829.052	138.497,59	28.851.418,33
381	01/04/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	10.947.619	140.264,92	29.251.064,43
382	01/05/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.066.187	142.044,39	29.654.588,07
383	01/06/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.184.754	143.836,09	30.062.026,85
384	01/07/2014	PELDA	1101	3.200.200	448.028	3.648.228	118.567	11.303.321	145.640,12	30.473.418,77
385	01/08/2014	PELDA	1101	3.301.100	462.154	3.763.254	122.306	11.425.627	147.482,25	30.892.576,81
386	01/09/2014	PELDA	1101	3.301.100	462.154	3.763.254	122.306	11.547.933	149.337,04	31.315.801,69
387	01/10/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.674.062	151.230,87	31.746.993,53
388	01/11/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.800.192	153.137,72	32.182.368,97
389	01/12/2014	PELTU	1101	3.404.300	476.602	3.880.902	126.129	11.926.321	155.057,68	32.621.968,60
390	01/01/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.060.020	157.042,88	33.073.476,16
391	01/02/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.193.718	159.041,73	33.529.364,43
392	01/03/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.327.417	161.054,32	33.989.675,92
393	01/04/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.461.115	163.080,75	34.454.453,53
394	01/05/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.594.814	165.121,10	34.923.740,61
395	01/06/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.728.513	167.175,49	35.397.580,91
396	01/07/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.862.211	169.244,00	35.876.018,59
397	01/08/2015	PELTU	1101	3.608.600	505.204	4.113.804	133.699	12.995.910	171.326,73	36.359.098,28

diperoleh:

- 1) Akumulasi iuran + pengembangan s.d. 1 Agustus 2015 sebesar Rp36.359.098,28
- 2) Penghasilan terakhir (P) pada 1 Agustus 2015 sebesar Rp4.113.804
- 3) Indeks iuran (FII) $\text{Rp36.359.098,28} : \text{Rp4.113.804} = 8,83832$

(Hanya digunakan 5 angka terakhir di belakang koma).

5. Menghitung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

5. Menghitung manfaat TA dengan menggunakan indeks pada huruf e angka 3):

$$\begin{aligned} \text{TA} &= \text{FII} \times \text{P} \\ &= 8,83832 \times 4.113.804 \\ &= 36.359.098,28 \\ &= 36.360.000 \text{ (pembulatan)}. \end{aligned}$$

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,

